

ABSTRAK

Reformasi di Indonesia berdampak pada sistem pemilihan Kepala Daerah guna pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi dalam jaminan kebebasan individu dan persamaan hak warga negara. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dibedakan menjadi sengketa administrasi atau sengketa awal dan sengketa hasil atau sengketa akhir. Upaya administrasi merupakan prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN. Ketidakpastian hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah yang telah selesai serta penambahan norma dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan implikasi terhadap kewenangan Peradilan TUN dalam pelaksanaan kewenangan Sengketa Pemilihan TUN.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan mengetahui mekanisme penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara berkaitan dengan sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan didasarkan pada studi kepustakaan berupa perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah. Serta metode analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berupa penegasan bahwa PTUN secara absolut tidak berwenang guna memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Adapun dinamika sikap PTUN dikarenakan adanya perubahan keadaan hukum berupa optimalisasi peran lembaga yang senyatanya diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa dari tahap administrasi dan hasil. Kemudian mekanisme penyelesaian Sengketa TUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang timbul dari suatu Keputusan TUN oleh Badan atau Pejabat TUN yang dianggap merugikan Penggugat. Mekanisme yang diberlakukan yakni berupa acuan terhadap Hukum Acara Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan berpedoman pada PERMA RI Nomor 5 Tahun 2017.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Tata Usaha Negara, Peraturan Perundang-Undangan.

ABSTRACT

Reforms in Indonesia have an impact on the system of electing regional heads in order to embody the principles of democracy in the guarantee of individual freedom and equal rights of citizens. Regional head election disputes are divided into administrative disputes or initial disputes and outcome disputes or final disputes. Administrative efforts are the procedures specified in legislation to resolve state administration disputes. Legal uncertainty in the completion of Regional Head Elections and the addition of norms in the provisions of Law Number 1 of 2015 have implications for the authority of the State Administration Judiciary in the implementation of the TUN Election Dispute authority.

The purpose of this research is to analyze the authority of State Administrative Courts in Election Disputes for Governors, Regents and Mayors in Indonesia based on Law Number 1 of 2015 and to find out the mechanism for resolving State Administrative Disputes related to election disputes for Governors, Regents and Mayors. based on Law Number 1 of 2015.

The approach method used is normative juridical with a descriptive analytical research specification. The type of data used is using secondary data in the form of primary materials, secondary materials, and tertiary materials. The data collection method used is based on literature study in the form of legislation, literature, and scientific papers. As well as data analysis methods using qualitative analysis methods.

Based on the results of the research, it is known that the authority of the State Administrative Court in Election Disputes for Governors, Regents and Mayors based on Law Number 1 of 2015 is an affirmation that the PTUN is absolutely not authorized to examine, decide, and resolve disputes over Regional Head Election. The dynamics of PTUN's attitude are due to changes in legal conditions in the form of optimizing the role of institutions which are in fact given the authority to resolve disputes from the administrative and outcome stages. Then the emanism of TUN dispute resolution based on Law Number 1 of 2015 arising from a TUN Decree by a State Administration Agency or Official which is deemed to be detrimental to the Plaintiff. The mechanism that is enforced is in the form of a reference to the State Administrative Procedure Law based on Law Number 5 of 1986 and is guided by PERMA RI Number 5 of 2017.

Keywords: *Regional Head Election, State Administration, Legislative Regulations.*